

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.SAN.2024/344-3843
Konu: Endonezya Pamuklu Kumaş Korunma Önlemi Soruşturması

Mersin, 13/08/2024

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlıđından alınan bir yazıda, Endonezya'nın açmış olduđu korunma önlemi soruşturmalarından, ülkemizin sadece pamuklu kumaşa ilişkin bir korunma önlemi uygulamasından etkileneceđi bilgisinin edinildiđi belirtilmektedir.

Bu çerçevede, ilgili üründe (Endonezya GTP'sine göre: 5208.12.00, 5208.32.00, 5208.49.00, 5208.51.90, 5208.52.90, 5209.12.00, 5209.22.00, 5209.29.00, 5209.32.00, 5209.39.00, 5209.42.00, 5209.51.90, 5209.59.90, 5210.29.00, 5210.39.00, 5210.41.90, 5210.51.90, 5211.11.00, 5211.19.00, 5211.20.00, 5211.42.00, 5211.43.00, 5211.49.00, 5212.11.00, 5212.24.00 ve 5212.25.90) kapsamında metre başına korunma önlemi uygulanacağı aktarılmaktadır.

Bu kapsamda 9 Ağustos 2024 tarihinden başlamak üzere 3 yıllık bir dönem için belirlenen korunma önlemleri; GTP bazında farklılık göstermekte olup, detaylar ekte iletilen bildirimde yer almaktadır.

Bilgilerini rica ederim.

H. Okan ŞENEL
Genel Sekreter V.

Ek: Bildirim - Endonezce (15 sayfa)





PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
TERHADAP IMPOR PRODUK KAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan tindakan pengamanan berupa pengenaan bea masuk tindakan pengamanan;
 - b. bahwa Menteri Keuangan telah menetapkan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk kain melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.010/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain yang telah berakhir masa berlakunya;
 - c. bahwa hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia membuktikan industri dalam negeri masih mengalami kerugian serius akibat dari jumlah impor produk kain masih mengalami peningkatan dan industri dalam negeri masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan penyesuaian struktural, sehingga perlu dilakukan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap barang impor berupa produk kain;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KAIN.

Pasal 1

- (1) Barang impor berupa produk kain dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pos tarif, segmentasi produk kain, besaran tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dan jangka waktu pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan tambahan dari:

- a. bea masuk umum (*Most Favoured Nation*); atau
- b. bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional,
yang telah dikenakan.

Pasal 3

- (1) Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi produk kain dari semua negara.
- (2) Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikecualikan terhadap importasi produk kain yang diproduksi dari negara tertentu.
- (3) Daftar negara yang dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan dan/atau dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk kain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta segmentasi produk kain yang dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan tercantum dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Importir wajib menyerahkan dokumen surat keterangan asal (*certificate of origin*) terhadap impor produk kain yang diproduksi dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Dalam hal importasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat keterangan asal (*certificate of origin*) preferensi, barang impor wajib memenuhi ketentuan asal barang berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.
- (3) Ketentuan asal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi:
 - a. kriteria asal barang (*origin criteria*);
 - b. kriteria pengiriman (*consignment criteria*); dan
 - c. ketentuan prosedural (*procedural provisions*).
- (4) Penelitian terhadap surat keterangan asal (*certificate of origin*) preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.
- (5) Dalam hal surat keterangan asal (*certificate of origin*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat keterangan asal (*certificate of origin*) non preferensi, penelitian surat keterangan asal (*certificate of origin*) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal importasi produk kain yang diproduksi dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atas importasi tersebut dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan.
- (2) Dalam hal surat keterangan asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sedang dilakukan permintaan *retroactive check*, atas importasi produk kain yang diproduksi dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Pasal 6

- (1) Besaran tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku terhadap barang impor produk kain yang:
 - a. dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan pengajuan pemberitahuan pabean; atau
 - b. tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean.
- (2) Pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2024



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
TERHADAP IMPOR PRODUK KAIN

A. POS TARIF, BESARAN TARIF BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN, DAN
JANGKA WAKTU PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN

No	Pos Tarif	Besaran Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan		
		Tahun pertama, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini	Tahun kedua, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya tahun pertama	Tahun ketiga, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya tahun kedua
A. Segmen Kain Tenunan dari Kapas				
1.	5208.12.00	Rp 1.657/meter	Rp 1.599/meter	Rp 1.542/meter
2.	5208.32.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
3.	5208.49.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
4.	5208.51.90	Rp 3.207/meter	Rp 3.094/meter	Rp 2.985/meter
5.	5208.52.90	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
6.	5209.12.00	Rp 3.315/meter	Rp 3.198/meter	Rp 3.086/meter
7.	5209.22.00	Rp 3.315/meter	Rp 3.198/meter	Rp 3.086/meter
8.	5209.29.00	Rp 3.315/meter	Rp 3.198/meter	Rp 3.086/meter
9.	5209.32.00	Rp 10.261/meter	Rp 9.899/meter	Rp 9.551/meter
10.	5209.39.00	Rp 10.261/meter	Rp 9.899/meter	Rp 9.551/meter
11.	5209.42.00	Rp 10.261/meter	Rp 9.899/meter	Rp 9.551/meter
12.	5209.51.90	Rp 10.261/meter	Rp 9.899/meter	Rp 9.551/meter
13.	5209.59.90	Rp 10.261/meter	Rp 9.899/meter	Rp 9.551/meter
14.	5210.29.00	Rp 1.842/meter	Rp 1.777/meter	Rp 1.714/meter
15.	5210.39.00	Rp 5.701/meter	Rp 5.500/meter	Rp 5.307/meter
16.	5210.41.90	Rp 5.701/meter	Rp 5.500/meter	Rp 5.307/meter
17.	5210.51.90	Rp 5.701/meter	Rp 5.500/meter	Rp 5.307/meter
18.	5211.11.00	Rp 3.315/meter	Rp 3.198/meter	Rp 3.086/meter
19.	5211.19.00	Rp 3.315/meter	Rp 3.198/meter	Rp 3.086/meter
20.	5211.20.00	Rp 3.315/meter	Rp 3.198/meter	Rp 3.086/meter
21.	5211.42.00	Rp 10.261/meter	Rp 9.899/meter	Rp 9.551/meter
22.	5211.43.00	Rp 10.261/meter	Rp 9.899/meter	Rp 9.551/meter
23.	5211.49.00	Rp 10.261/meter	Rp 9.899/meter	Rp 9.551/meter
24.	5212.11.00	Rp 1.657/meter	Rp 1.599/meter	Rp 1.542/meter

No	Pos Tarif	Besaran Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan		
		Tahun pertama, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini	Tahun kedua, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya tahun pertama	Tahun ketiga, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya tahun kedua
25.	5212.24.00	Rp 10.261/meter	Rp 9.899/meter	Rp 9.551/meter
26.	5212.25.90	Rp 10.261/meter	Rp 9.899/meter	Rp 9.551/meter
B. Segmen Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial				
27.	ex5407.10.20 Kain tenunan untuk ban, selain tidak dikelantang; <i>conveyor duck</i> , selain tidak dikelantang	Rp 1.507/meter	Rp 1.454/meter	Rp 1.403/meter
28.	5407.10.91	Rp 1.507/meter	Rp 1.454/meter	Rp 1.403/meter
29.	5407.20.00	Rp 1.507/meter	Rp 1.454/meter	Rp 1.403/meter
30.	5407.30.00	Rp 1.507/meter	Rp 1.454/meter	Rp 1.403/meter
31.	5407.44.00	Rp 4.664/meter	Rp 4.500/meter	Rp 4.341/meter
32.	5407.51.00	Rp 1.382/meter	Rp 1.333/meter	Rp 1.286/meter
33.	5407.52.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
34.	5407.53.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
35.	5407.54.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
36.	5407.61.90	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
37.	5407.74.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
38.	5407.81.00	Rp 1.507/meter	Rp 1.454/meter	Rp 1.403/meter
39.	5407.82.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
40.	5407.83.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
41.	5407.84.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
42.	5407.91.00	Rp 1.507/meter	Rp 1.454/meter	Rp 1.403/meter
43.	5407.92.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
44.	5407.93.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
45.	5407.94.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
46.	5408.22.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
47.	5408.24.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
48.	5408.32.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
49.	5408.34.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
C. Segmen Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial				
50.	5512.29.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
51.	5513.11.00	Rp 1.382/meter	Rp 1.333/meter	Rp 1.286/meter
52.	5513.12.00	Rp 1.382/meter	Rp 1.333/meter	Rp 1.286/meter
53.	5513.21.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter

No	Pos Tarif	Besaran Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan		
		Tahun pertama, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini	Tahun kedua, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya tahun pertama	Tahun ketiga, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya tahun kedua
54.	5513.23.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
55.	5513.39.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
56.	5513.49.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
57.	5514.12.00	Rp 1.657/meter	Rp 1.599/meter	Rp 1.542/meter
58.	5514.21.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
59.	5514.22.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
60.	5514.29.00	Rp 6.413/meter	Rp 6.187/meter	Rp 5.969/meter
61.	5514.42.00	Rp 6.413/meter	Rp 6.187/meter	Rp 5.969/meter
62.	5514.43.00	Rp 5.701/meter	Rp 5.500/meter	Rp 5.307/meter
63.	5514.49.00	Rp 5.701/meter	Rp 5.500/meter	Rp 5.307/meter
64.	5515.11.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
65.	5515.12.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
66.	5515.91.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
67.	5515.99.90	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
68.	5516.11.00	Rp 1.657/meter	Rp 1.599/meter	Rp 1.542/meter
69.	5516.13.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
70.	5516.14.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
71.	5516.22.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
72.	5516.24.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
73.	5516.92.00	Rp 5.131/meter	Rp 4.950/meter	Rp 4.776/meter
D. Segmen Kain Tule dan Kain Jaring Lainnya; Renda; Kain Sulaman				
74.	5804.10.11	Rp 25.648/kg	Rp 24.745/kg	Rp 23.874/kg
75.	5804.10.19	Rp 25.648/kg	Rp 24.745/kg	Rp 23.874/kg
76.	5804.10.29	Rp 25.655/kg	Rp 24.752/kg	Rp 23.881/kg
77.	5804.10.99	Rp 25.655/kg	Rp 24.752/kg	Rp 23.881/kg
78.	5804.21.90	Rp 25.655/kg	Rp 24.752/kg	Rp 23.881/kg
79.	5804.29.10	Rp 25.654/kg	Rp 24.751/kg	Rp 23.880/kg
80.	5804.29.90	Rp 25.654/kg	Rp 24.751/kg	Rp 23.880/kg
81.	5804.30.00	Rp 25.654/kg	Rp 24.751/kg	Rp 23.880/kg
82.	5810.92.00	Rp 6.414/meter	Rp 6.188/meter	Rp 5.970/meter
E. Segmen Kain Rajutan atau Kaitan				
83.	6001.21.00	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg
84.	6001.92.20	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg
85.	6001.92.90	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg
86.	6004.10.90	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg

No	Pos Tarif	Besaran Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan		
		Tahun pertama, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini	Tahun kedua, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya tahun pertama	Tahun ketiga, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya tahun kedua
87.	6004.90.00	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg
88.	6005.21.00	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg
89.	6005.36.90	Rp 8.285/kg	Rp 7.995/kg	Rp 7.710/kg
90.	6005.37.90	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg
91.	6005.90.90	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg
92.	6006.10.00	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg
93.	6006.21.00	Rp 8.285/kg	Rp 7.995/kg	Rp 7.710/kg
94.	6006.22.00	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg
95.	6006.23.00	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg
96.	6006.24.00	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg
97.	6006.31.90	Rp 8.285/kg	Rp 7.995/kg	Rp 7.710/kg
98.	6006.32.10	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg
99.	6006.32.20	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg
100.	6006.32.90	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg
101.	6006.33.10	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg
102.	6006.34.10	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg
103.	6006.42.10	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg
104.	6006.42.90	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg
105.	6006.43.90	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg
106.	6006.44.10	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg
107.	6006.44.90	Rp 25.655/kg	Rp 24.750/kg	Rp 23.880/kg

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
TERHADAP IMPOR PRODUK KAIN

B. DAFTAR NEGARA DAN SEGMENTASI PRODUK KAIN YANG DIKENAKAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN DAN/ATAU YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN

No	Negara	Segmen Kain Tenunan dari Kapas	Segmen Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial	Segmen Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial	Segmen Kain Tule dan Kain Jaring Lainnya; Renda; Kain Sulaman	Segmen Kain Rajutan atau Kaitan
1.	Afghanistan	√	X	X	X	X
2.	Albania	√	X	X	X	X
3.	Angola	√	X	X	X	X
4.	Antigua and Barbuda	√	X	X	X	X
5.	Argentina	√	X	X	X	X
6.	Armenia	√	X	X	X	X
7.	Bahrain, Kingdom of	√	X	X	X	X
8.	Bangladesh	√	X	X	X	X
9.	Barbados	√	X	X	X	X
10.	Belize	√	X	X	X	X
11.	Benin	√	X	X	X	X
12.	Bolivia, Plurinational State of	√	X	X	X	X
13.	Botswana	√	X	X	X	X
14.	Brazil	√	X	X	X	X
15.	Brunei Darussalam	√	X	X	X	X

No	Negara	Segmen Kain Tenunan dari Kapas	Segmen Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial	Segmen Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial	Segmen Kain Tule dan Kain Jaring Lainnya; Renda; Kain Sulaman	Segmen Kain Rajutan atau Kaitan
16.	Burkina Faso	√	X	X	X	X
17.	Burundi	√	X	X	X	X
18.	Cabo Verde	√	X	X	X	X
19.	Cambodia	√	X	X	X	X
20.	Cameroon	√	X	X	X	X
21.	Central African Republic	√	X	X	X	X
22.	Chad	√	X	X	X	X
23.	Chile	√	X	X	X	X
24.	China	√	√	√	√	√
25.	Colombia	√	X	X	X	X
26.	Congo	√	X	X	X	X
27.	Costa Rica	√	X	X	X	X
28.	Côte d'Ivoire	√	X	X	X	X
29.	Cuba	√	X	X	X	X
30.	Democratic Republic of the Congo	√	X	X	X	X
31.	Djibouti	√	X	X	X	X
32.	Dominica	√	X	X	X	X
33.	Dominican Republic	√	X	X	X	X
34.	Ecuador	√	X	X	X	X
35.	Egypt	√	X	X	X	X
36.	El Salvador	√	X	X	X	X
37.	Eswatini	√	X	X	X	X
38.	Fiji	√	X	X	X	X
39.	Gabon	√	X	X	X	X

No	Negara	Segmen Kain Tenunan dari Kapas	Segmen Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial	Segmen Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial	Segmen Kain Tule dan Kain Jaring Lainnya; Renda; Kain Sulaman	Segmen Kain Rajutan atau Kaitan
40.	Gambia	√	X	X	X	X
41.	Georgia	√	X	X	X	X
42.	Ghana	√	X	X	X	X
43.	Grenada	√	X	X	X	X
44.	Guatemala	√	X	X	X	X
45.	Guinea	√	X	X	X	X
46.	Guinea-Bissau	√	X	X	X	X
47.	Guyana	√	X	X	X	X
48.	Haiti	√	X	X	X	X
49.	Honduras	√	X	X	X	X
50.	Hong Kong, China	√	√	√	√	√
51.	India	√	X	√	X	X
52.	Israel	√	X	X	X	X
53.	Jamaica	√	X	X	X	X
54.	Jordan	√	X	X	X	X
55.	Kazakhstan	√	X	X	X	X
56.	Kenya	√	X	X	X	X
57.	Korea, Republic of	√	√	√	√	√
58.	Kuwait, the State of	√	X	X	X	X
59.	Kyrgyz Republic	√	X	X	X	X
60.	Lao People's Democratic Republic	√	X	X	X	X
61.	Lesotho	√	X	X	X	X
62.	Liberia	√	X	X	X	X
63.	Macao, China	√	X	X	X	X

No	Negara	Segmen Kain Tenunan dari Kapas	Segmen Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial	Segmen Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial	Segmen Kain Tule dan Kain Jaring Lainnya; Renda; Kain Sulaman	Segmen Kain Rajutan atau Kaitan
64.	Madagascar	√	X	X	X	X
65.	Malawi	√	X	X	X	X
66.	Malaysia	√	√	√	√	X
67.	Maldives	√	X	X	X	X
68.	Mali	√	X	X	X	X
69.	Mauritania	√	X	X	X	X
70.	Mauritius	√	X	X	X	X
71.	Mexico	√	X	X	X	X
72.	Moldova, Republic of	√	X	X	X	X
73.	Mongolia	√	X	X	X	X
74.	Montenegro	√	X	X	X	X
75.	Morocco	√	X	X	X	X
76.	Mozambique	√	X	X	X	X
77.	Myanmar	√	X	X	X	X
78.	Namibia	√	X	X	X	X
79.	Nepal	√	X	X	X	X
80.	Nicaragua	√	X	X	X	X
81.	Niger	√	X	X	X	X
82.	Nigeria	√	X	X	X	X
83.	North Macedonia	√	X	X	X	X
84.	Oman	√	X	X	X	X
85.	Pakistan	√	X	X	X	X
86.	Panama	√	X	X	X	X
87.	Papua New Guinea	√	X	X	X	X

No	Negara	Segmen Kain Tenunan dari Kapas	Segmen Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial	Segmen Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial	Segmen Kain Tule dan Kain Jaring Lainnya; Renda; Kain Sulaman	Segmen Kain Rajutan atau Kaitan
88.	Paraguay	√	X	X	X	X
89.	Peru	√	X	X	X	X
90.	Philippines	√	X	X	X	X
91.	Qatar	√	X	X	X	X
92.	Russian Federation	√	X	X	X	X
93.	Rwanda	√	X	X	X	X
94.	Saint Kitts and Nevis	√	X	X	X	X
95.	Saint Lucia	√	X	X	X	X
96.	Saint Vincent and the Grenadines	√	X	X	X	X
97.	Samoa	√	X	X	X	X
98.	Saudi Arabia, Kingdom of	√	X	X	X	X
99.	Senegal	√	X	X	X	X
100.	Seychelles	√	X	X	X	X
101.	Sierra Leone	√	X	X	X	X
102.	Singapore	√	X	X	X	X
103.	Solomon Islands	√	X	X	X	X
104.	South Africa	√	X	X	X	X
105.	Sri Lanka	√	X	X	X	X
106.	Suriname	√	X	X	X	X
107.	Chinese Taipei	√	√	X	√	√
108.	Tajikistan	√	X	X	X	X
109.	Tanzania	√	X	X	X	X
110.	Thailand	√	X	X	X	X
111.	Togo	√	X	X	X	X

No	Negara	Segmen Kain Tenunan dari Kapas	Segmen Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial	Segmen Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial	Segmen Kain Tule dan Kain Jaring Lainnya; Renda; Kain Sulaman	Segmen Kain Rajutan atau Kaitan
112.	Tonga	√	X	X	X	X
113.	Trinidad and Tobago	√	X	X	X	X
114.	Tunisia	√	X	X	X	X
115.	Türkiye	√	X	X	X	X
116.	Uganda	√	X	X	X	X
117.	United Arab Emirates	√	X	X	X	X
118.	Uruguay	√	X	X	X	X
119.	Vanuatu	√	X	X	X	X
120.	Venezuela, Bolivarian Republic of	√	X	X	X	X
121.	Viet Nam	√	X	X	√	√
122.	Yemen	√	X	X	X	X
123.	Zambia	√	X	X	X	X
124.	Zimbabwe	√	X	X	X	X

Keterangan:

(√) = dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan

(X) = tidak dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI